



Makna Politik dan Demokrasi Bagi Masyarakat Desa Powalutan

Fransiska Mangar¹, Romi Mesra²

^{1, 2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹20606053@unima.ac.id, ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 12, 2025

Accepted December 20, 2025

Published January 30, 2026

Kata Kunci: Demokrasi Lokal, Makna Politik, Masyarakat Desa



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna politik dan demokrasi bagi masyarakat Desa Powalutan serta mengidentifikasi bagaimana warga mengkonstruksi pemahaman dan praktik berdemokrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap tiga narasumber. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Powalutan memaknai demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada seluruh warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Tradisi musyawarah mufakat menjadi praktik demokrasi lokal yang paling dominan dan mengakar kuat. Pengaruh tokoh informal sangat signifikan dalam membentuk persepsi politik warga. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi politik dan ketimpangan partisipasi antarkelompok masyarakat.

Abstract

This study aims to examine the meaning of politics and democracy for the people of Powalutan Village and identify how residents construct their understanding and practice of democracy in their daily lives. The study used a qualitative approach with data collection techniques through direct observation and in-depth interviews with three informants. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldana model through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the people of Powalutan Village interpret democracy as a system of government that gives all citizens the right to participate in decision-making. The tradition of deliberation and consensus is the most dominant and deeply rooted local democratic practice. The influence of informal figures is very significant in shaping residents' political perceptions. The main challenges faced are low political literacy and inequality of participation between community groups.

Keywords: Local Democracy, Political Meaning, Village Society

1. Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi telah menjadi landasan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam konteks Indonesia, proses demokratisasi yang dimulai sejak era reformasi tahun 1998 membawa perubahan mendasar dalam tata kelola politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum semata, tetapi juga mencakup partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka

(Budiardjo, 2008). Pemahaman masyarakat terhadap demokrasi sangat menentukan kualitas partisipasi politik yang terwujud di setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, bahkan hingga ke pelosok desa.

Masyarakat pedesaan merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik unik dalam memahami dan memaknai politik serta demokrasi. Kehidupan komunal, ikatan adat, dan ketergantungan pada tokoh-tokoh lokal menjadi faktor yang memengaruhi cara pandang masyarakat desa terhadap demokrasi. Menurut Norris (2011), literasi politik masyarakat yang rendah dapat berimplikasi pada rendahnya partisipasi dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Di sisi lain, Dahl (2015) menegaskan bahwa demokrasi yang sesungguhnya mensyaratkan adanya pemahaman yang memadai dari warga negara tentang hak-hak politiknya, sehingga mereka mampu terlibat secara bermakna dalam proses politik. Realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa masih memahami demokrasi sebatas prosedur pemilihan suara, tanpa memahami substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Desa Powalutan sebagai salah satu desa yang berada di wilayah Indonesia memiliki dinamika politik lokal yang menarik untuk dikaji. Interaksi antara nilai-nilai kultural lokal dengan sistem demokrasi modern menciptakan pola pemahaman yang khas di kalangan masyarakatnya. Penelitian yang dilakukan oleh Pratikno dan Lay (2017) menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan di Indonesia cenderung memiliki pemahaman demokrasi yang bersifat prosedural dan sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama serta pemimpin adat setempat. Kondisi ini mencerminkan bahwa makna demokrasi tidak bersifat universal, melainkan dikonstruksi secara sosial berdasarkan konteks lokal masing-masing komunitas. Oleh karena itu, penelitian tentang makna politik dan demokrasi bagi masyarakat Desa Powalutan menjadi penting untuk dilakukan guna memahami dinamika demokrasi dari perspektif masyarakat akar rumput secara lebih mendalam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami makna politik dan demokrasi di masyarakat pedesaan Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Aspinall dan Sukmajati (2015) mengkaji praktik demokrasi elektoral di tingkat desa dan menemukan bahwa patronase politik dan mobilisasi berbasis identitas masih sangat dominan dalam menentukan perilaku pemilih di perdesaan. Studi ini menegaskan bahwa demokrasi prosedural di tingkat lokal seringkali diwarnai oleh praktik-praktik transaksional yang mereduksi substansi demokrasi itu sendiri. Sementara itu, penelitian Hadiz (2010) mengidentifikasi bahwa oligarki lokal memainkan peran sentral dalam membentuk wajah demokrasi di tingkat desa, di mana kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elit yang memanfaatkan momentum demokratisasi untuk mempertahankan pengaruh mereka.

Penelitian lain yang relevan adalah karya Antlov (2003) yang secara khusus mengkaji demokrasi desa di Indonesia pasca reformasi. Antlov menemukan bahwa proses desentralisasi dan otonomi daerah membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi warga desa dalam pengambilan keputusan lokal, meskipun kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme demokrasi masih sangat bervariasi. Selain itu, Hidayat (2019) dalam penelitiannya tentang persepsi masyarakat terhadap demokrasi di desa-desa Jawa menemukan bahwa banyak warga desa memaknai demokrasi melalui lensa budaya gotong royong dan musyawarah mufakat, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal modern. Kedua penelitian ini secara kolektif menggambarkan kompleksitas makna demokrasi di level grassroots dan menjadi pijakan penting bagi penelitian tentang Desa Powalutan.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang demokrasi di tingkat desa secara umum, terdapat celah penelitian yang

signifikan yang belum terjawab. Sebagian besar studi yang ada cenderung berfokus pada aspek struktural dan prosedural demokrasi, seperti sistem pemilihan dan pola patronase, tanpa menggali secara mendalam bagaimana masyarakat desa secara individual dan kolektif mengkonstruksi makna politik dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian tentang dimensi subjektif dan interpretatif dari pengalaman berdemokrasi masyarakat desa, khususnya di kawasan Indonesia Timur seperti Sulawesi, masih sangat terbatas dan belum mendapat perhatian yang proporsional dari para peneliti.

Lebih spesifik lagi, belum ada penelitian yang secara eksklusif mengkaji Desa Powalutan sebagai locus penelitian politik dan demokrasi. Kekosongan ini menjadi problematik mengingat setiap desa memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik yang berpengaruh pada cara warganya memaknai dan mempraktikkan demokrasi. Penelitian-penelitian sebelumnya juga umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada perilaku pemilih dan tingkat partisipasi, sementara pendekatan kualitatif yang mampu menangkap kedalaman makna dan pengalaman subjektif warga desa terhadap politik dan demokrasi masih kurang dikembangkan. Gap inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini sebagai upaya untuk mengisi kekosongan literatur yang ada.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik dan mendalam terhadap konstruksi makna politik dan demokrasi dari perspektif masyarakat Desa Powalutan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan unit analisis yang lebih luas, penelitian ini mengambil Desa Powalutan sebagai situs penelitian yang memungkinkan pengkajian secara menyeluruh dan holistik terhadap dinamika lokal yang khas. Penggunaan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini juga merupakan sebuah kebaruan metodologis yang memungkinkan peneliti untuk menangkap secara autentik pengalaman hidup (*lived experience*) warga desa dalam berhadapan dengan sistem politik dan demokrasi, melampaui sekadar data statistik partisipasi politik yang selama ini menjadi tolok ukur utama kajian demokrasi tingkat desa.

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif teoritis yang baru dengan mengintegrasikan teori konstruksi sosial makna dari Berger dan Luckmann (1966) dengan konsep demokrasi deliberatif dari Habermas (1996) dalam konteks masyarakat desa Indonesia. Integrasi dua kerangka teori ini belum pernah diterapkan secara eksplisit dalam penelitian demokrasi desa di Indonesia, sehingga penelitian ini berpotensi menghasilkan model analisis baru yang lebih mampu menjelaskan kompleksitas pemahaman demokrasi di tingkat akar rumput. Kontribusi teoritis ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu politik lokal dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian serupa di desa-desa lain di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang beragam.

Realitas politik yang terjadi di Desa Powalutan mencerminkan potret demokrasi pedesaan Indonesia yang penuh dengan kontradiksi dan kompleksitas. Di satu sisi, antusiasme warga desa dalam mengikuti prosesi pemilihan umum, baik pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden, tampak cukup tinggi yang ditandai dengan tingginya angka partisipasi pemilih. Namun di sisi lain, pemahaman warga tentang hak-hak politik mereka di luar konteks pemilihan umum masih sangat terbatas. Kondisi ini menciptakan paradoks demokrasi di mana prosedur demokrasi berjalan, tetapi substansi dan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik warga Desa Powalutan sehari-hari.

Realitas lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh kuat tokoh-tokoh informal seperti pemuka agama, tetua adat, dan tokoh masyarakat dalam membentuk persepsi dan

perilaku politik warga Desa Powalutan. Dalam konteks ini, demokrasi tidak sepenuhnya dipahami sebagai sistem yang berdiri otonom, melainkan selalu diinterpretasikan melalui filter nilai-nilai tradisional dan relasi-relasi sosial yang telah lama mengakar. Fenomena ini selaras dengan apa yang diamati oleh Geertz (1973) bahwa kebudayaan lokal bertindak sebagai sistem simbol yang memengaruhi cara manusia memaknai realitas sosial-politiknya. Dengan demikian, upaya untuk memahami makna politik dan demokrasi bagi masyarakat Desa Powalutan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap konteks budaya, sejarah, dan struktur sosial yang membentuk komunitas desa tersebut secara keseluruhan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipandang paling sesuai untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif subjektif masyarakat Desa Powalutan terhadap politik dan demokrasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari sudut pandang para pelaku sosial itu sendiri, bukan sekadar mengukur variabel secara statistik. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tepat ketika peneliti ingin memahami makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap kompleksitas dan kedalaman pemahaman masyarakat Desa Powalutan tentang politik dan demokrasi yang tidak akan mampu terungkap hanya melalui angka-angka dan data statistik semata. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam.

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati aktivitas keseharian masyarakat Desa Powalutan yang berkaitan dengan praktik politik dan demokrasi, termasuk interaksi sosial, forum-forum musyawarah warga, dan perilaku politik masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sugiyono (2019), observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih autentik karena peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap tiga narasumber yang dipilih secara purposif, yakni Bapak Ferdinand Kesek, Bapak Frans Mamesah, dan Ibu Etsi Lumempow, yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait kehidupan politik dan berdemokrasi di Desa Powalutan.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh data mentah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dipilah dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan proses interpretasi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari ketiga narasumber serta mencocokkannya dengan hasil observasi lapangan, sebagaimana direkomendasikan oleh Moleong (2017) sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pemahaman Masyarakat Desa Powalutan tentang Demokrasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Powalutan, ditemukan bahwa demokrasi dipandang oleh masyarakat sebagai sebuah sistem pemerintahan yang banyak disukai dan dikagumi karena dianggap memberikan ruang bagi setiap warga untuk bersuara. Namun demikian, sebagaimana semua sistem pemerintahan pada umumnya, demokrasi

tidaklah sempurna dan memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya di tingkat desa. Masyarakat menyadari bahwa partisipasi aktif seluruh warga merupakan syarat mutlak agar demokrasi dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan keputusan yang benar-benar mencerminkan kehendak bersama.

Hasil wawancara dengan ketiga narasumber mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Powalutan memahami demokrasi sebagai bentuk sistem pemerintahan yang mengedepankan hak rakyat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Bapak Ferdinand Kesek, Bapak Frans Mamesah, dan Ibu Etsi Lumempow sepakat bahwa demokrasi bukan hanya urusan pemerintah, melainkan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan paling kecil seperti keluarga dan sekolah hingga pemerintahan negara. Pandangan ini sejalan dengan konsep demokrasi partisipatif yang dikemukakan oleh Pateman (1970), yang menekankan bahwa esensi demokrasi terletak pada keterlibatan aktif warga dalam setiap lapisan kehidupan sosial, bukan hanya pada momen pemilihan umum semata.

Pemahaman masyarakat Desa Powalutan tentang demokrasi yang bersifat inklusif ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai demokratis yang cukup menggembirakan di tingkat akar rumput. Kesadaran bahwa semua warga masyarakat memegang peran penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar demokrasi telah mulai meresap ke dalam cara berpikir masyarakat desa. Putnam (1993) dalam kajiannya tentang modal sosial dan demokrasi menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi di tingkat lokal sangat bergantung pada rasa saling percaya antar warga dan kesediaan mereka untuk terlibat dalam urusan bersama demi kebaikan kolektif. Fenomena yang ditemukan di Desa Powalutan ini menunjukkan bahwa modal sosial tersebut mulai terbentuk meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

b. Sistem Politik dan Urgensi Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Masyarakat Desa Powalutan

Narasumber penelitian ini secara konsisten menyatakan bahwa sistem politik dan demokrasi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan negara Indonesia. Bagi masyarakat Desa Powalutan, kehadiran sistem politik yang demokratis dipandang sebagai jaminan bahwa kepentingan rakyat kecil, termasuk masyarakat desa, akan tetap diperhatikan dan diperjuangkan oleh pemerintah. Keyakinan ini mencerminkan harapan besar masyarakat bahwa demokrasi dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan berpihak kepada rakyat, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Masyarakat Desa Powalutan menyadari bahwa tanpa sistem politik yang demokratis, pengambilan keputusan akan cenderung terpusat pada segelintir orang dan mengabaikan kepentingan mayoritas rakyat. Sistem politik dan demokrasi dipandang sebagai mekanisme yang memberikan legitimasi kepada pemerintah sekaligus memberikan ruang bagi rakyat untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja para pemimpinnya. Hal ini senada dengan pandangan Lijphart (1999) yang menyatakan bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem yang memberikan mekanisme akuntabilitas vertikal, yakni kemampuan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka secara periodik dan damai. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Powalutan telah memiliki kesadaran tentang fungsi kontrol demokratis meskipun diekspresikan dalam bahasa yang sederhana dan lugas.

Lebih jauh, pandangan narasumber menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sangat mendukung terwujudnya pemerintahan yang adil dan demokratis dalam kehidupan nyata masyarakat. Keyakinan ini tidak lahir dari pemahaman teoritis semata, melainkan dibentuk oleh pengalaman historis masyarakat yang pernah merasakan dampak dari sistem pemerintahan yang otoriter sebelum era reformasi. Menurut Diamond (2008), transisi demokrasi yang berhasil di negara-negara berkembang pada umumnya didorong oleh kehendak kolektif masyarakat untuk keluar dari belenggu otoritarianisme dan membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Pengalaman historis ini tampaknya telah membentuk persepsi positif masyarakat Desa Powalutan terhadap sistem demokrasi sebagai pilihan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan aspirasi mereka.

c. Praktik Membangun Demokrasi dan Politik di Lingkungan Masyarakat Desa Powalutan

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Powalutan memahami bahwa membangun demokrasi di lingkungan masyarakat mensyaratkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua kalangan tanpa terkecuali. Para narasumber menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pandangan ini mencerminkan nilai kesetaraan sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang telah meresap dalam kesadaran warga Desa Powalutan, seiring dengan pengalaman mereka dalam menjalankan berbagai forum musyawarah dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa.

Praktik berdemokrasi yang ditemukan di Desa Powalutan sangat erat kaitannya dengan tradisi musyawarah mufakat yang telah lama mengakar dalam budaya masyarakat setempat. Musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan bersama dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk nyata dari demokrasi yang paling sesuai dengan nilai-nilai lokal mereka. Habermas (1996) dalam teori demokrasi deliberatifnya menegaskan bahwa kualitas demokrasi sesungguhnya diukur bukan dari prosedur pemungutan suara semata, melainkan dari kualitas diskursus dan musyawarah yang berlangsung di antara warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, tradisi musyawarah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Powalutan sejatinya merupakan bentuk demokrasi deliberatif yang autentik dan berakar pada kearifan lokal.

Meskipun demikian, tantangan dalam membangun demokrasi di Desa Powalutan tetap tidak bisa diabaikan. Ketimpangan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan formal sebagian warga, serta dominasi tokoh-tokoh tertentu dalam forum-forum musyawarah masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar partisipasi demokrasi dapat berjalan secara lebih inklusif dan setara. Tocqueville (dalam Putnam, 1993) mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat sipil yang kuat dan aktif sebagai penyeimbang kekuasaan formal pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas warga Desa Powalutan melalui pendidikan politik yang berkelanjutan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan menjadi agenda yang mendesak untuk dilaksanakan guna mewujudkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

4. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Powalutan telah memiliki pemahaman dasar tentang politik dan demokrasi yang terbentuk melalui pengalaman hidup,

tradisi lokal, dan interaksi sosial sehari-hari. Demokrasi dimaknai bukan semata sebagai prosedur pemilihan umum, melainkan sebagai sistem yang memberikan ruang bagi setiap warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Nilai-nilai musyawarah mufakat yang telah lama mengakar dalam budaya masyarakat setempat terbukti menjadi fondasi kuat bagi praktik berdemokrasi di tingkat lokal, meskipun pemahaman tentang hak-hak politik yang lebih substantif seperti transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat masih perlu ditingkatkan. Pengaruh tokoh-tokoh informal seperti pemuka agama dan tetua adat juga terbukti sangat dominan dalam membentuk persepsi dan perilaku politik warga, sehingga demokrasi di Desa Powalutan bersifat kultural dan kontekstual, bukan sekadar adopsi mekanis dari sistem formal yang berlaku secara nasional.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi di tingkat desa sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ketimpangan akses informasi dan rendahnya pendidikan politik formal masih menjadi hambatan utama yang membatasi kualitas partisipasi demokrasi warga Desa Powalutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan literasi politik warga, memperkuat forum-forum musyawarah yang inklusif, serta mendorong keterlibatan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti perempuan dan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Dengan demikian, demokrasi di Desa Powalutan tidak hanya akan berjalan secara prosedural, tetapi juga tumbuh menjadi demokrasi yang substantif, bermakna, dan benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh warga masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Antlov, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Doubleday.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (2015). *On democracy* (2nd ed.). Yale University Press.
- Diamond, L. (2008). *The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world*. Times Books.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Hidayat, S. (2019). Persepsi masyarakat desa terhadap demokrasi: Studi kasus desa-desa di Jawa. *Jurnal Politik Indonesia*, 4(1), 45–62.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Norris, P. (2011). Democratic deficit: Critical citizens revisited. Cambridge University Press.
- Pateman, C. (1970). Participation and democratic theory. Cambridge University Press.
- Pratikno, & Lay, C. (2017). Demokrasi lokal dan kepemimpinan desa: Dinamika politik perdesaan Indonesia pasca desentralisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 1–18.
- Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif (Edisi ke-3). Alfabeta.